



BADAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2016 - 2021

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

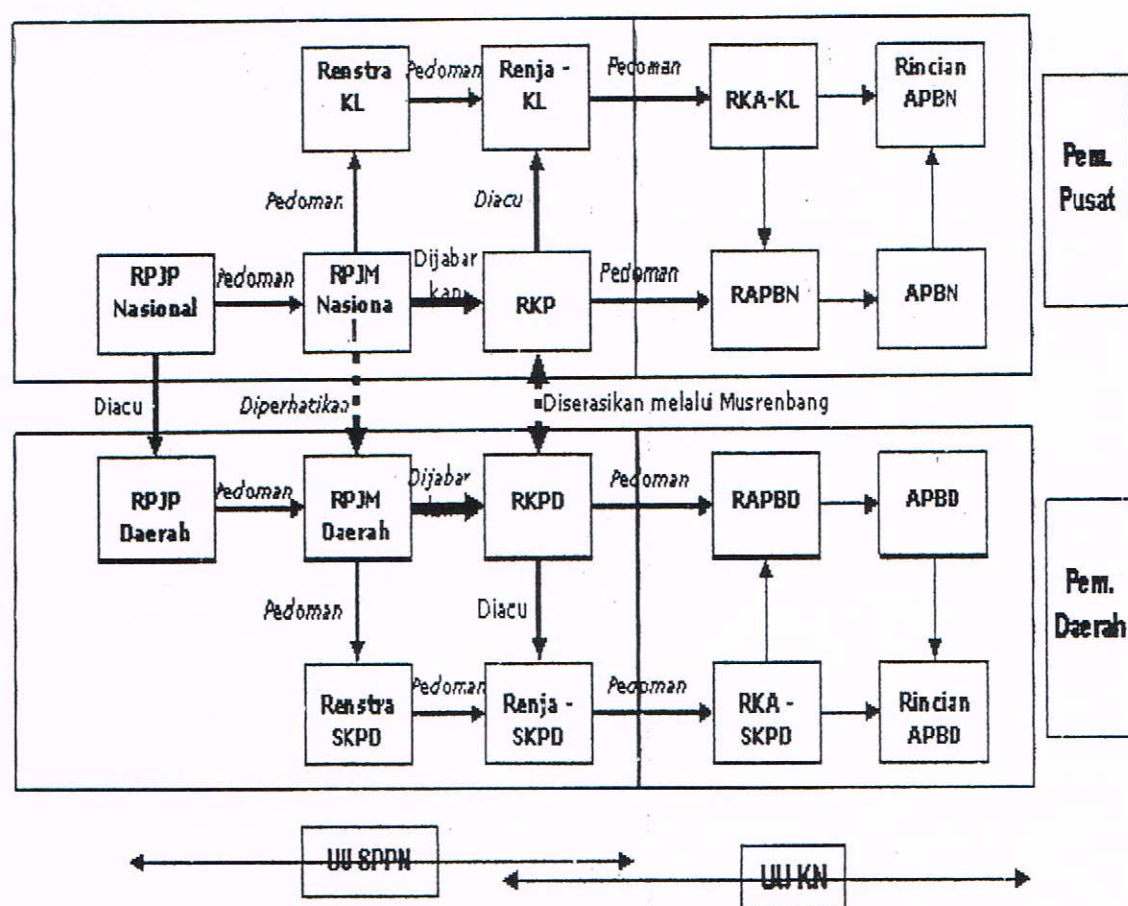
Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD.

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Propinsi/Kanupaten/Kota, sama hal dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok

Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
21. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur OPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan aset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra OPD dalam RPJMD, Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan penentuan isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan OPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang keuangan
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi selaku PPKD yang melaksanakan fungsi Bendaharan Umum Daerah.

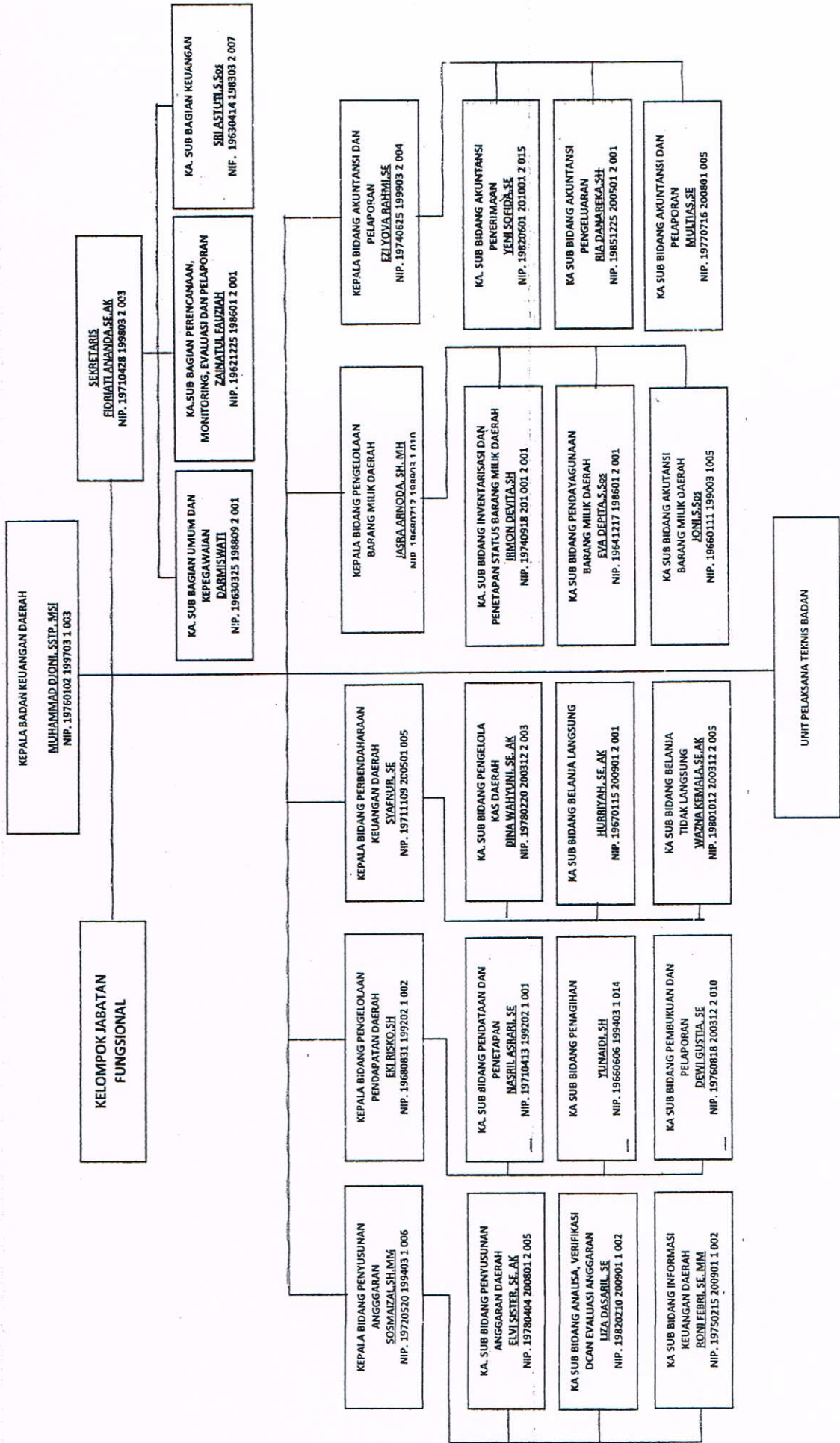
Struktur organisasi tentang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah terdiri dari Kepala, Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 15 (lima belas) Sub Bidang seperti tergambar dibawah ini.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Aparatur.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok saat ini sebanyak 71 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

SUSUNAN BADAN KEUANGAN DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

1.	Kepala Badan	:	Muhammad Djoni, SSTP. MSI
2.	Sekretaris	:	Fidriati Ananda, SE. Ak.
	2.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	Darmiswati.
	2.2. Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	:	Zainatul Fauziah.
	2.3. Kasubag Keuangan	:	Sri Astuti, S. Sos.
3.	Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah	:	Sosmaizal, SH. MM.
	3.1. Kasubid Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	:	Elvi Sister, SE. Ak.
	3.2. Kasubid Analisa, Verifikasi dan Evaluasi Anggaran	:	Liza Dasril, SE.
	3.3. Kasubid Informasi Keuangan Daerah	:	Roni Febri, SE. MM.
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	:	Eki Risiko, SH.
	4.1. Kasubid Pendataan dan Penetapan	:	Nasri Asrari, SE
	4.2. Kasubid Penagihan	:	Yunaidi, SH.
	4.3. Kasubid Pembukuan dan Pelaporan	:	Dewi Gustia, SE
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah	:	Syafnur, SE
	5.1. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	:	Dina Wahyuni, SE. Ak.
	5.2. Kasubid Belanja Langsung	:	Huriyah, SE. Ak.
	5.3. Kasubid Belanja Tidak Langsung	:	Wasna Kemala, SE. Ak.
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	:	Jasra Arnodā, SH. MH
	6.1. Kasubid Inventarisasi dan Penetapan Status Barang Milik Daerah	:	Irmon Devita, SH
	6.2. Kasubid Pendayagunaan Barang Milik Daerah	:	Eva Depita, S. Sos
	6.3. Kasubid Akuntansi Barang Milik Daerah	:	Joni, S. Sos
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	:	Ezi Yova Rahmi, SE
	6.1. Kasubid Akuntansi Penerimaan	:	Yeni Sofida, SE
	6.2. Kasubid Akuntansi Pengeluaran	:	Ria Danareka, SH
	6.3. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan	:	Multias, SE

Berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas Pejabat Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan;

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan;

II. BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH.

Bidang Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penyusunan anggaran daerah, analisa, verifikasi dan evaluasi anggaran, serta informasi keuangan daerah;
2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyusunan anggaran daerah, analisa, verifikasi dan evaluasi anggaran, serta informasi keuangan daerah.

Bidang Penyusunan Anggaran Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah;
2. Sub Bidang Analisa, Verifikasi dan Evaluasi Anggaran;
3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah.

III. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH:

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
2. Sub Bidang Penagihan; dan
3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

IV. BIDANG PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. PenPenyusunan Kebijakan Teknis dan Penyelenggaraan program di bidang pengelola kas daerah, belanja langsung, dan belanja tidak langsung;
3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelola kas daerah, belanja langsung, dan belanja tidak langsung.

Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah terdiri dari

1. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah;
2. Sub Bidang Belanja Langsung;
4. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

V. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang inventarisasi, penetapan status, pendayagunaan dan akuntansi barang milik daerah;
2. pelaporan dan evaluasi kegiatan inventarisasi, penetapan status, pendayagunaan dan akuntansi barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:

1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penetapan Status Barang Milik Daerah;
2. Sub Bidang Pendayagunaan Barang Milik Daerah;
3. Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah.

VI. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi penerimaan, pengeluaran dan pelaporan;
2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan akuntansi penerimaan, pengeluaran dan pelaporan;

Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 serta Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah, Sumber Daya Aparatur memegang peran utama dan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok saat ini sebanyak 71 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

**a. Data Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan
(Keadaan 31 Januari 2017).**

No.	Golongan (PNS/THL)	Jumlah (Orang)
1.	IV	4
2.	III	41
3.	II	9
4.	I	0
5.	THL	17
Jumlah.....		71

**b. Data Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan
(Keadaan 31 Januari 2017)**

No.	Nama	Jabatan	Eselon	Pendi- dikan	Jurusan
I	Muhammad Djoni, SSTP. MSi	Kepala	II.b	S.2	Ilmu Perencanaan dan kebijakan Publik
1.	Sekretariat Fidriati Ananda, SE. Akt	Sekretaris	III.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
2.	Darmiswati	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	SMA	IPS
3.	Zainatul Fauziah	Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	SMEA	Tata Usaha
4.	Sri Astuti, S. Sos	Kasubag Keuangan	IV.a	S.1	Ilmu Administrasi Negara
5.	Darmawan, SE	Fungsional Umum		S.1	Ekonomi Manajemen
6.	Desnibar, B. Ac	Fungsional Umum		D.III	Akuntansi
7.	Wide Marini, SE	Fungsional Umum		S.1	Ekonomi Akuntansi
8.	Yance Trisnawati, A. MAF	Fungsional Umum		D.III	Analisis farmasi
9.	Fitri Amd	Fungsional Umum		D.III	Akuntansi
10.	Nofridelvi, A. Md	Fungsional Umum		D.III	Ekonomi Akuntansi
11.	Masri, M.S. Sos	Fungsional Umum		SLTA	Ilmu Administrasi Negara
12.	Delmi	Fungsional Umum		Paket. C	IPS
13.	Ramli Waher	Fungsional Umum		Paket. C	
II.	Bidang Penyusunan Anggaran Daerah				
1.	Sosmaizal. SH. MM	Kabid Penyusunan Anggaran Daerah	III.b	S.2	Manajemen SDM
2.	Elvi Siter, SE. Ak	Kasubid Penyusunan Anggaran Daerah	IV.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
3.	Liza Dasril, SE	Kasubid Analisis Verifikasi dan Evaluasi Anggaran	IV.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
4.	Roni Febri, SE. MM	Kasubid Informasi Keuangan Daerah	IV.a	S.2	
5.	H. Yunasman, SE. M.Si	Fungsional Umum		S.2	
6.	Yunita Indriani, S. Kom	Fungsional Umum		S.1	Komputer
7.	Widya Burmana, SE	Fungsional Umum		S.1	Ekonomi Akuntansi

8.	Yulisma	Fungsional Umum		SLTA	
9.	Eka Benny Syaputra, S. Kom	Fungsional Umum		S.1	Komputer
III. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah					
1.	Eki Risiko, SH	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	III.b	S.1	Hukum
2.	Nasril Asrari, SE	Kasubid Pendataan dan Penetapan	IV.a	S.1	Ekonomi Manajemen
3.	Yunaidi, SE	Kasubid Penagihan	IV.a	S.1	Hukum
4.	Dewi Gustia, SE	Kasubid Pembukuan dan Pelaporan	IV.a	S.1	Ekonomi Pembangunan
5.	Maimurni	Fungsional Umum		AMA	IPS
6.	Desriyenti, S. Sos	Fungsional Umum		S.1	Ilmu Administrasi Negara
7.	Mulyaliza, A. Md	Fungsional Umum		D.III	Akuntansi
8.	Novia Herawati	Fungsional Umum		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
9.	Jamaatul Amsar, AS. Sos	Fungsional Umum		S.1	Ilmu Administrasi Negara
10.	Azwirman	Fungsional Umum		Paket c	
11.	Oskar	Fungsional Umum		SMK	Eletronika
12.	Musril	Fungsional Umum		SLTA	
IV. Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah					
1.	Syafnur, SE	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	III.b	S.1	Ekonomi Akuntansi
2.	Dina Wahyuni, SE. Ak	Kasubid Pengelola Kas Daerah	IV.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
3.	Huriyah, SE. Ak	Kasubid Belanja Langsung	IV.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
4.	Wazna Kemala, SE. Ak	Kasubid Belanja Tidak Langsung	IV.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
5.	Elisma. M, SE	Fungsional Umum		S.1	Ekonomi Manajemen
6.	Nurhuda, S. Sos	Fungsional Umum		S.1	Ilmu Administrasi Negara
7.	Yoserizal, SH. MM	Fungsional Umum		S.2	Manajemen
8.	Yuniko Malfafino, A. Md	Fungsional Umum		D.III	Kearsipan
9.	Salmanir	Fungsional Umum		Paket. C	IPA
V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1.	Jasra Arnoda, SH. MH	Kabid Pengelolaan BMD	III.b	S.2	Master Hukum
2.	Irmon Devita, SH	Kasubid Inventarisasi dan Penetapan Status BMD	IV.a	S.1	Hukum

3.	Eva Depita, S. Sos	Kasubid Pendayagunaan BMD	IV.a	S.1	Ilmu Administrasi Negara
4.	Joni, S. Sos	Kasubid Akuntansi BMD	IV.a	S.1	Ilmu Administrasi Negara
5.	Vivi Afrina Suryasti, SE	Fungsional Umum		S.1	Ekonomi
VI. Bidang Akuntansi dan Pelaporan					
1.	Ezi Yova Rahmi, SE	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	III.b	S.1	Manajemen
2.	Yeni Sofida, SE	Kasubid Akuntansi Penerimaan	IV.a	S.1	Ekonomi Akuntansi
3.	Ria Danareka, SH	Kasubid Akuntansi Pengeluaran	IV.a	S.2	Teknologi Informasi
4.	Multias, SE	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan	IV.a	S.1	Ekonomi Manajemen
5.	Rina Afrina, S. Sos	Fungsional Umum		S.1	Ilmu Administrasi Negara

**c. Data Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan Struktural
(Keadaan s/d 31 Januari 2017)**

No.	Esselon	Aparatur		Jumlah (orang)
		Perempuan (orang)	Laki-Laki (orang)	
1	II.b	-	1	1
2	III.a	1	-	1
3	III.b	1	4	5
4	IV.a	13	5	18
Jumlah		15	10	25

d. Data berdasarkan Pendidikan Formal (Keadaan s/d 31 Januari 2017)

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	S2	6
2	S1	36
3	D.III	7
4	SLTA	20
5	SLTP	2
Jumlah		71

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Keuangan Daerah di dukung dengan peralatan / Barang Milik Daerah yang cukup memadai sebagaimana terurai dibawah ini :

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Hutan Lain-lain	307	m2
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	1822	m2
3	Tanah Bangunan Pertokoan	1001	m2
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4587	m2
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	794.89	m2
6	Tanah Bangunan Dermaga	10.04	m2
7	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	9.01	m2
8	Tanah Bangunan Pembibitan	4879.49	m2
9	Tanah Lapangan Tenis	1.68	m2
10	Tanah Lapangan Olahraga Lain-lain	2.16	m2
11	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	19.44	m2
12	Stone Crusher	1	Unit
13	Mesin Proses Lain-lain	3	Unit
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	12	Unit
15	Sepeda Motor	33	Unit
16	Receiver	3	Unit
17	Global Positioning System (GPS)	1	Buah
18	Scanner	2	Unit
19	Oven	1	Buah
20	Lemari Penyimpanan	16	Buah
21	Rak-rak Penyimpanan	1	Unit
22	Mesin Ketik	6	Unit
23	Mesin Kalkulator	51	Buah
24	Mesin Fotocopy Kertas Folio	1	Unit
25	Mesin Porporasi	3	Unit
26	Lemari Besi	19	Buah
27	Rak Besi/Metal	9	Buah
28	Rak Kayu	14	Buah
29	Filling Besi/Metal	24	Buah
30	Brankas	2	Buah
31	Lemari Sorok	4	Buah
32	Lemari Kaca	1	Buah
33	Lemari Kayu	40	Buah
34	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
35	Papan Pengumuman	2	Buah
36	White Board	5	Buah
37	Mesin Absensi	2	Unit
38	Display	1	Buah
39	Genset	3	Unit
40	Pompa Air	1	Unit
41	Papan Nama Ruangan/Jabatan	5	Buah
42	Meja Kayu/Rotan	4	Buah

43	Kursi Besi/Metal	9	Buah
44	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	Set
45	Meja Rapat	2	Set
46	Meja Tulis	1	Buah
47	Meja Makan	1	Buah
48	Kursi Rapat	119	Buah
49	Kursi Tamu	12	Buah
50	Kursi Biasa	1	Buah
51	Meja Komputer	3	Buah
52	Sofa	3	Set
53	Lemari Pakaian	1	Buah
54	Tempat Tidur Busa (Spring Bed)	4	Set
55	Kursi Kerja	73	Buah
56	Gorden	4	Helai
57	Dinding/Sekat Kayu	1	Buah
58	Karpet	3	Buah
59	Vacum Cleaner	1	Unit
60	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
61	Lemari Es/Kulkas	1	Unit
62	AC	5	Unit
63	Kipas Angin	3	Unit
64	Kompor Gas	1	Unit
65	Mesin Giling Bambu	1	Unit
66	Dispenser	1	Buah
67	Televisi	5	Unit
68	Loudspeaker	8	Unit
69	Wireless	2	Unit
70	Tustel	3	Buah
71	Alat Hiasan	2	Buah
72	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1	Buah
73	Alat Rumah Tangga Lain-lain	64	Buah
74	Tangga	3	Buah
75	Personal Komputer Lain	17	Unit
76	PC Unit/Komputer PC	59	Unit
77	Laptop	8	Unit
78	Notebook	74	Unit
79	CPU	2	Unit
80	Serial Pointer	4	Unit
81	Plotter	1	Unit
82	Hardisk	12	Buah
83	Keyboard	30	Buah
84	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2	Unit
85	Printer	78	Unit
86	Komputer Kompatibel	1	Unit
87	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	7	Unit
88	Flashdisk	78	Buah
89	Monitor	11	Unit
90	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	106	Unit
91	UPS	21	Unit
92	Hardisk Internal	17	Buah

93	Hardisk Eksternal	25	Buah
94	DVD Room Drive	1	Unit
95	Speaker Aktiv Komputer	11	Unit
96	Mouse	57	Buah
97	Memory	4	Buah
98	Server	7	Unit
99	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	Unit
100	Swich Hub	2	Buah
101	Meja Kerja	54	Buah
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
103	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Buah
105	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	Buah
106	Camera + Attachment	6	buah
107	Proyektor Attachment	3	Unit
108	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1	Buah
109	Layar Proyektor	2	Buah
110	Kamera Elektronik	1	Buah
111	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit
112	Pesawat Telephone	1	Unit
113	Alat Komunikasi Lain-lain	2	Unit
114	Sendok Cetak	1	Buah
115	Tablet Machine	20	Unit
116	Mixer	2	Buah
117	Stabilizer	20	Unit
118	Personal Komputer	5	Unit
119	Compas	1	Buah
120	Tangki Pemanas	1	Unit
121	Gambar Total	1	Buah
122	Kabel Listrik	62	Buah
123	Bendera dan Gabus	99	Buah
124	Layar	1	Unit
125	Pita Ukuran (Meteran)	1	Buah
126	Gambar Tokoh-tokoh Nasional	1	Buah
127	Dosimeter Charge	1	Buah
128	Tape Recorder	1	Unit
129	Overhead Cranes Lain-lain	1	Unit
130	Alat Pelindung Lain-lain	1	Buah
131	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5325	m2
132	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	69	m2
133	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	225	m2
134	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1480	m2
135	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	200	m2
136	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	540	m2

137	Gedung Pos Jaga Permanen	15	m2
138	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	542	m2
139	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	1249	m2
140	Rumah Adat	72	m2
141	Jaringan	2	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN

Tingkat capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah pada Renstra periode 2016-2021 dapat digambarkan pada tabel 2.1 terlampir.

Berdasarkan Visi Renstra priode sebelumnya yaitu “ **Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** “ telah dapat direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dengan telah diterapkannya sistem penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berbasis akrual) dan besarnya peningkatan anggaran dan Realisasi PAD.

Dalam Penyelesaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan telah kita laksanakan dengan tepat waktu. Hal ini dapat kita capai ditunjang Sumber Daya Manusia yang kompeten juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, salah satunya dengan penggunaan SIPKD dalam Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPPKA
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015

DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Kabupaten					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terperuhnya pengiriman surat surat dan paket			1 Tahun						100	100.00	0.00		0	99.96	99.77	-	0	0
2	Terperuhnya kebutuhan jasa listrik, air dan telepon			1 Tahun						82	100.00	0.00		0	57.03	79.64	-	0	0
3	Terperuhnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			1 Tahun						92	100.00	0.00		0	53.31	39.84	-	0	0
4	Terperuhnya Kebutuhan alat tulis Kantor			1 Tahun						100	99.00	0.00		0	99.99	96.58	-	0	0
5	Terperuhnya bahan cetakan, kartu, blanko dan lain kebutuhan dinas			1 Tahun						90	99.00	0.00		0	64.25	71.76	-	0	0
6	Terperuhi alat-alat listrik/penerangan kantor			1 Tahun						100	100.00	0.00		0	100.00	97.31	-	0	0
7	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			1 Tahun						100	100.00	0.00		0	97.86	96.23	-	0	0
8	Terperuhnya kebutuhan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan			1 Tahun						99.00	89.00	0.00		0	99.40	99.29	-	0	0
9	Terperuhnya kebutuhan makan dan Minu			1 Tahun						96.00	90.00	0.00		0	95.19	91.57	-	0	0
10	Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah			1 Tahun						99.90	99.00	0.00		0	100.00	81.32	-	0	0
11	Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah			1 Tahun						85.80	100.00	0.00		0	98.62	99.66	-	0	0
12	Tersedianya Juknis tentang Bansos			100%	1	1	1	1	1	-	-	0.00		0	-	-	-	0	0
13	Terperuhnya Kebutuhan Administrasi Kantor			1 Tahun						-	-	100.00	100	100	-	-	86.24	93.34	90.18
14	Terperuhnya Jasa Pelayanan Administrasi Kantor									-	99.00				-	81.19			
15	Terperuhnya pengadaan kendaraan unit			2 Tahun						100	100.00	0.00			95.87	78.16	-		

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Kabupaten						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
16	2 Tersedianya pengadaan mobil	3	4	5 1 Tahun	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	Pemenuhan Jasa Kebersihan terhadap operasional Kantor			5 Tahun						81.00	100.00	0.00	-		77.00	86.78	-			
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			5 Tahun						99.20	100.00	0.00	-		93.23	100.00	-			
19	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 Tahun						76.00	97.40	0.00	-		61.81	96.77	-			
20	Terpenuhi nya jasa dan kebersihan terhadap operasional kantor			100%						-	97.00	99,67	100	100		96.77	98.65	98.12	91.16	
21	Terlaksananya rehap gedung arsip			100%						-	-	0.00	100	100		-	-	99.65	93.98	
22	Terciptanya Kenyamanan dalam Melaksanakan Kegiatan Kantor			100%						100.00	-	99.17	100	100		-	87.58	99.00	98.54	
23	Terpenuhi nya aparatur berpakaian hari-hari tertentu			100%						-	-	0.00	100		-	-	-	92.00	0	
24	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan			4 Tahun						79.50	97.00	100.00			53.64	56.66	42.54			
25	Penerapan Peraturan Perundang-undangan			2 Tahun						-		100.00	100	16.36			42.54	59.90	16.36	
26	Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Semester, KKPJ dan LPPD			100%						100.00	100.00	0.00	100	100	70.05	66.95	-	81.86	67.79	
27	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan semesteran			10 Buah						100.00	100.00	0.00			83.00	82.90	-			
28	Tersusun nya laporan akhir tahun			5 Buah						100.00	100.00	0.00			90.87	71.06	-			
29	Tersusun nya laporan akhir tahun/AKIP			1 Tahun						-	99.00				-	99.50				
30	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD			100%						-	-	100.00			-	-	99.97			

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Kabupaten					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	Tersedianya Buku Pedoman Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemda Kab. Solok tahun 2015			100%						-	-	0.00	100		-	-	-	89.71	
32	Terselenggaranya Siklus Akuntansi Pemerintah daerah			100%						-	-	0.00	84		-	-	-	55.11	
33	Tersusunnya DPA 2014, DPA Perumahan 2014, Sisdur APBD			1 Tahun						100	99.05	100.00	100	100	76.45	84.00	81.07	80.44	77.78
34	Tersusunnya Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi			10 Perda	3	3	4	0	0	3	-	0.00			47.57	-	-		47.57
35	Tersusunnya buku pendapatan dan Beianja Derah			5 Perda	1	1	1	1	1	100	100.00	100.00	100	100	56.56	69.36	82.29	69.18	86.12
36	Tersusunnya buku penjabaran APBD			5 Perbup	1	1	1	1	1	100	100.00	100.00	100	100	81.32	72.89	55.94	59.85	84.16
37	Tersusunnya buku rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			5 Perda	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	88.65	88.71	86.95	90.49	95.60
38	SKPD yang mempedomani APBD tentang penjabaran Perubahan APBD			5 Perbup	1	1	1	1	1	100	100.00	100.00	100	100	97.50	92.06	79.44	87.02	72.83
39	Peturan Daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan buku laporan kinerja			5 Perda	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100	100	98.54	99.54	99.44	95.59	99.45
40	Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD			5 Perbup	1	1	1	1	1	100.00	100.00	105.00	100	100	99.68	99.66	99.27	98.08	99.56
41	Pelaksanaan Penatausahaan yang baik dan sistim informasi keuangan daerah			5 Perbup	1	1	1	1	1	100	99.67				89.94	94.69	-		
42	Pelaksanaan penatausahaan keuangan yang sistematis			5 Perbup	1	1	1	1	1	100	100.00	100.00	100	100	87.12	94.86	97.00	96.13	
43	Tertelaksananya sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan keuangan daerah			150 Orang	30	30	30	30	30	27	99.00	0.00			63.60	100.00	-		
44	Tertelaksananya Bimbingan Tekhnis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			150 orang	30	30	30	30	30	26	99.43	100.00	100	100	45.82	77.91	85.37	96.38	86.36

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Kabupaten						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45	Terciptanya Manajemen Aset yang Baik dan Sistematis			Gedung/Bangunan Pemerintah 30 Unit dan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 25 Unit	1	1	1	1	1		100.00	100.00	99.58	100	100		69.67	98.00	95.46	90.62
46	Terlaksananya pengelolaan aset/barang daerah sehingga terciptanya manajemen aset yang baik dan benar			Seluruh SKPD, Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah 525	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang		95.00	100.00	100.00	98.00	100		31.54	96.00	83.13	92.85
47	Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			100%	1	1	1	1	1		-	84.95	164.72	100	100	-	94.61	81.00	86.96	65.57
48	Terperuhnya sistem implementasi pengelolaan keuangan daerah			5 Tahun 141 SKPD	1	1	1	1	1		-	-	97.50	100	100	-	-	85.98	76.16	93.93
49	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Aset Daerah di setiap SKPD, Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah			200 Orang	40	40	40	40	40		100	100.00	0.00				76.45	-		
50	Terlaksananya pengelolaan hibah, bansos dan bantuan keuangan pada Nagari dengan baik			100%							-	100.00	98.67	100	100	-	50.90	87.41	95.34	93.87
51	Terwujudnya Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2 dan PPHTB lebih baik dari tahun sebelumnya			100%							-	-	99.17	100	100	-	-	29.24	90.80	93.60
52	Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan keuangan daerah			100%							-	-	0.00		100	-	-	-		94.27
53	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur bagi Bendahara Penerima dan pembantu bendahara Penerima		1	Tahun							-	-	0.00	100	100	-	-	-	90.22	85.87
54	Terselenggaranya Penatausahaan Pengelolaan Gaji			100%							-	-	0.00		100	-	-	-		90.11
55	Terselenggaranya Penyusunan laporan keuangan daerah			100%							-	-	0.00		100	-	-	-		86.59

No.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Kabupaten					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56	Terlaksananya Pengelolaan Belanja SKPD sesuai Aturan			100%						-	-	0.00		100	-	-	-		94.16
57	Terselenggaranya Penyelesaian Kerugian daerah			100%						-	-	0.00		100	-	-	-		60.91
58	Tersedianya buku Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah			50 Buah						-	-	0.00		100	-	-	-		96.95
59	Terwujudnya pelaksanaan dan pelaporan DBH CHT			1 Tahun						-	-	0.00			-	-	-		
60	Persentase rancangan Peraturan daerah tentang Pernyataan Modal daerah			1 Tahun						-	-	0.00			-	-	-		
61	Terselenggaranya Penatausahaan pelaksanaan TPGR			100%						-	-	0.00			-	-	-		
62	Evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Nagari			74 Nagari	1	1	1	1	1	1.00	100.00	0.00		100	99.82	89.07	-		78.17

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN

NO.	ANALISIS SWOT	
1	Kekuatan	Sarana dan Prasarana yang memadai yang menunjang pelaksanaan kegiatan
2.	Kelemahan	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD yang tidak tepat waktu.
3.	Peluang	1. Adanya Teknologi Informasi dan Aplikasi yang mempermudah pelaksanaan pekerjaan. 2. Tersedianya Dana yang memadai untuk pengembangan Sumber Daya Manusia.
4.	Ancaman	1. SKPD kurang serius/proaktif dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan kurang mempedomi peraturan tentang Barang Milik Daerah. 2. Banyak SKPD berpikiran Target PAD menjadi beban.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Badan Keuangan Daerah sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam mencapai hal tersebut, masih ditemui permasalahan-permasalahan seperti :

- 1) Masih rendahnya kesadaran sebagian para wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
- 2) Belum maksimalnya perhitungan penetapan target pendapatan.
- 3) Belum Optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama yang terkait dengan pemanfaatan dan pengamanan barang daerah.
- 4) Kurang disiplinnya Bendaharawan SKPD dalam menyampaikan SPJ setiap bulannya.
- 5) Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem informasi keuangan daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021, mempunyai Visi : ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara” Syarak Basandi Kitabullah***”.

Adapun yang menjadi Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok periode tahun 2016-2021 adalah :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang memadai.
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi “ Adat Basandi Syara”, Syara’ Basandi Kitabullah”
5. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 , dimana masing-masing agenda disertai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang bertanggung jawab untuk mencapai target Visi dan Misi tersebut yang tertuang kedalam Empat Pilar Pembangunan yang terdiri dari :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Ekonomi Kerakyatan.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Empat Pilar Pembangunan diatas didukung dengan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat pada semua Jenjang Pendidikan.
2. Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.
5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan Sektor Ekonomi lainnya.
6. Penguatan Kedaulatan Pangan.
7. Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka Perluasan Akses Ekonomi.
8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.

9. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintah Nagari yang kuat dengan meningkatkan Peran Tungku Tigo Sajaringan.
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk tercapainya Visi "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah***", Maka diterjemahkan kedalam 5 Misi , 17 tujuan dan 34 sasaran .

Dari 5 Misi , 17 tujuan dan 34 sasaran tersebut, Badan Keuangan Daerah berperan dalam misi ke 5 Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan tujuan meningkatkan Birokrasi yang Baik dan Bersih, Profesional serta Pro rakyat dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Aparatur yang Profesional.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Belum akuntabelnya pengelolaan keuangan daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Belum optimalnya pengelolaan aset-aset daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI BADAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Solok, maka **Visi** Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Solok yaitu ***"Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang profesional, transparan dan akuntanbel"***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan APBD.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Keuangan Daerah seperti yang dikemukakan diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja. Penetapan rencana kinerja ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program,

kegiatan dan alokasi sumber daya dalam operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupten Solok beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan administrasi keuangan yang tertib dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP	100	100	100	100	100	100
		2. Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100	100
		3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	10	10	10	10	10

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan kebijakan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

STRATEGI :

- Meningkatkan jumlah aparatur yang belum mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengikuti Diklat serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur melalui diklat substantif.
- Mengali potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara Intensifikasi maupun Ektensifikasi terhadap pemasukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan kinerja, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengelolaan keuangan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.
- Menyediakan regulasi yang jelas dan aplikatif dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang lebih komprehensif .
- Menyempurnakan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada.
- Memberikan reward and punishment

KEBIJAKAN :

Dalam rangka mengimplementasi Strategi yang telah disusun diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Aparatur untuk meningkatkan SDM dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, salah satunya dengan mengikutsertakan untuk mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan tupoksi.
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.
3. Memantau seluruh pengembangan teknologi informasi dan mewujudkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 peran Badan Keuangan Daerah berada pada misi ke 5 Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan tujuan meningkatkan Birokrasi yang Baik dan Bersih, profesional serta Pro rakyat dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah didukung oleh Aparatur yang Profesional.

Maka untuk mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah didukung oleh Aparatur yang Profesional. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok berikut disajikan pada Tabel 5.1 Lampiran berikut :

TABEL 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								2016		2017		2018		2019		2020		2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	2	1.Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP waktu	03 02 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	7	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln	1 Tln</

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021, indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kerja DPPKA terlampir pada lampiran 6,1

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP		100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti		75	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		10	10	10	10	10	10	

KAEDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yang telah disusun ini, akan dijadikan pedoman oleh segenap aparatur Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas - tugas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah . Artinya tujuan atau sasaran, strategis kebijakan, program/kegiatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah yang direncanakan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka output, outcome, benefit dari pelaksanaan tugas - tugas pengelolaan pendapatan , keuangan dan barang milik daerah diharapkan akan dapat memberikan dampak sesuai indikator kinerja yang ditetapkan

Dampak selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih, yang ditandai dengan terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sehingga opini terbaik dari BPK (WTP) dapat diperoleh.

BAB VII

PENUTUP

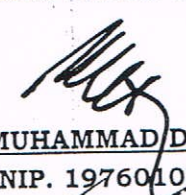
Demikianlah Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 dibuat dan dirumuskan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah kebijakan lima tahunan bagi segenap aparatur Badan keuangan Daerah Kabupaten Solok dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tugas dan fungsi organisasi pada kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Dampak dari pelaksanaan renstra ini diharapkan akan dapat berimplikasi terhadap terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021.

Keberhasilan untuk melaksanakan Renstra yang telah disepakati bersama ini akan sangat ditentukan oleh tekad dan semangat, kesungguhan dan kebersamaan dalam melaksanakannya serta atas izin Allah SWT. Oleh karena itu kepada seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok diharapkan untuk dapat berperan pro aktif secara sungguh - sungguh dalam pelaksanaan renstra ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2016 - 2021 yaitu: ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan dan penataan aset yang profesional, transparan dan akuntabel.***

Akhirnya diharapkan semoga Rencana Strategis ini akan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin.

Arosuka, Februari 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


MUHAMMAD DJONI, SSTP. MSI
NIP. 19760102 199703 1 003

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.600,000	15.683,200	0	0	0	0	0	0	28.440,000	10.500,000	0	0	0	0	70,05	66,95	-	-	(8.120,000)	-
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	3.000,000	3.000,000	0	0	0	0	0	0	2.490,000	2.487,000	0	0	0	0	83,00	82,90	-	-	(600,000)	-
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.500,000	3.500,000	0	0	0	0	0	0	4.998,000	2.487,000	0	0	0	0	90,87	71,06	-	-	(1.100,000)	-
4. Kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	32.000,000	37.000,000	51.300,000	0	0	0	0	0	31.990,000	29.990,000	34.776,000	0	0	81,05	99,97	67,79	51.300,000	24.516,000,00
5. Kegiatan Penyusunan Laporan AKIP SKPD	0	3.500,000	0	0	0	0	0	0	0	3.482,500	0	0	0	0	99,50	-	-	-	-	-
VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																				
1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	0	0	0	63.600,000	0	0	0	0	0	0	0	61.541,950	0	0	0	0	89,71	-	-	-
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0	164.750,000	0	0	0	0	0	0	0	90.797,397	0	0	0	0	55,11	-	-	-
3. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	584.060,000	597.075,000	436.500,850	627.952,750	608.459,850	326.914,750	517.590,700	382.136,655	302.160,350	388.353,100	204.167,060	179.537,050	577.617,150	60.41	55,97	86,69	87,55	83,96	491.647,850	351.567,657
4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	150.000,000	0	0	0	0	0	71.347,500	0	0	0	0	0	0	0	47,57	-	-	-	(30.000,000)	-
5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD	500.200,000	450.400,000	514.000,000	527.200,000	670.675,365	302.160,350	388.353,100	354.656,008	380.141,905	388.353,100	204.167,060	179.537,050	577.617,150	60.41	55,97	86,69	87,55	83,96	491.647,850	351.567,657
6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	431.494,350	389.215,350	365.000,000	300.000,000	256.820,000	350.910,400	283.703,640	204.167,060	350.910,400	283.703,640	204.167,060	179.537,050	577.617,150	60.41	55,97	86,69	87,55	83,96	491.647,850	351.567,657
7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Daerah tentang Perubahan APBD	349.166,550	0	359.000,000	0	451.004,600	245.259,200	0	257.381,550	245.259,200	0	257.381,550	0	431.223,375	70.24	71,69	-	-	95,60	381.251,290	341.006,455
8. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	0	363.116,550	0	338.000,000	0	0	263.270,800	0	0	263.270,800	0	332.323,730	0	0	92,83	72,50	-	-	-	-
9. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	189.000,000	219.000,000	250.000,000	247.992,400	169.250,000	184.265,900	201.608,350	198.613,580	184.265,900	201.608,350	198.613,580	215.793,000	123.257,875	97,50	92,06	79,45	87,02	72,83	131.450,000	89.407,875
10. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	162.400,000	237.760,000	164.954,900	232.400,000	179.950,000	160.021,200	236.660,350	164.025,744	160.021,200	236.660,350	164.025,744	222.151,916	178.953,648	98,54	99,54	99,44	95,59	99,45	147.470,000	142.963,648
11. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	115.000,000	140.900,000	146.400,250	161.439,000	151.399,000	114.628,500	140.214,950	145.333,588	114.628,500	140.214,950	145.333,588	158.342,176	150.736,636	99,68	99,66	99,27	98,08	99,56	128.399,000	120.458,836
12. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	809.132,000	0	0	0	0	809.132,000	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-	-	-	-	(161.826,400)	-
13. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	314.622,000	1.642.822,760	1.894.538,550	2.203.910,700	0	274.105,150	1.554.214,200	1.830.519,484	274.105,150	1.554.214,200	1.830.519,484	2.119.153,116	-	87,12	96,62	96,61	96,15	-	(62.924,400)	-

14. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	81,400,000	4,736,500	0	0	0	0	52,257,800	4,736,500	0	0	64.20	100.00	-	-	-	(16,280,000)	-
15. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	149,022,000	233,516,000	200,650,000	104,087,500	198,429,800	68,281,500	181,933,400	171,309,400	96,851,500	171,372,293	45.82	77.91	85.38	93.05	86.36	168,625,400	131,686,333
16. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang daerah	383,900,000	966,720,930	593,756,100	2,579,230,400	1,239,455,000	367,849,205	673,492,584	581,209,151	2,462,250,632	1,123,190,648	95.82	69.67	97.89	95.46	90.62	1,162,675,000	875,299,648
17. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah	300,525,000	438,489,180	0	0	0	299,980,000	336,080,050	0	0	-	99.82	76.65	-	-	-	(60,105,000)	-
18. Kegiatan Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah	490,230,000	300,000,000	169,295,000	372,924,390	215,545,003	469,063,130	94,628,000	163,107,899	310,002,063	200,137,274	95.68	31.54	96.35	83.13	92.85	117,499,003	157,028,273
19. Kegiatan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah	1,191,988,795	1,666,776,400	1,013,800,000	1,415,805,000	1,381,301,040	919,253,617	1,511,034,133	822,700,595	1,257,396,210	905,773,768	77.12	90.66	81.15	88.81	65.57	1,142,903,281	629,513,560
20. Kegiatan Sistem Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah	278,800,000	130,850,000	352,400,000	700,359,700	463,500,000	0	124,126,000	260,006,378	533,382,544	435,352,025	-	94.86	85.98	76.16	93.93	407,740,000	342,652,025
21. Kegiatan Pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan keuangan pada nagari	0	155,977,600	240,977,600	268,877,600	170,977,600	0	79,394,500	210,542,100	256,342,457	160,498,205	-	50.90	87.41	95.34	93.87	170,977,600	126,302,685
22. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB.	0	0	2,210,395,000	2,169,095,000	828,947,000	0	0	530,693,450	1,969,608,190	775,924,316	-	-	24.01	90.80	93.60	828,947,000	610,134,916
23. Kegiatan pelaksanaan anggaran daerah dan perbendaharaan keuangan daerah	0	0	0	0	829,045,400	0	0	0	0	781,512,563	-	-	-	-	54.27	829,045,400	615,703,483
24. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah	0	0	0	135,000,000	270,648,960	0	0	0	121,797,700	232,399,650	-	-	-	90.22	85.87	270,648,960	178,269,858
25. Kegiatan Pelaksanaan administrasi pengelolaan gaji pegawai negeri sipil	0	0	0	0	460,067,200	0	0	0	0	414,568,351	-	-	-	-	90.11	460,067,200	322,554,911
26. Kegiatan Pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan daerah	0	0	0	0	510,735,000	0	0	0	0	442,225,607	-	-	-	-	86.59	510,735,000	340,078,607
27. Kegiatan Pengawasan dan pembinaan keuangan daerah	0	0	0	0	326,742,700	0	0	0	0	307,672,766	-	-	-	-	94.16	326,742,700	242,324,226
28. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Keuangan Negara	0	0	0	0	205,000,000	0	0	0	0	124,863,050	-	-	-	-	60.91	205,000,000	83,863,050
29. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	11,600,000	0	0	0	0	11,246,355	-	-	-	-	96.95	11,600,000	8,926,355
30. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi serta Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan DBH-CHT	0	63,792,633	0	0	0	0	56,810,321	0	0	-	-	89.05	-	-	-	-	-
31. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyetaraan Modal Daerah	0	150,000,000	0	0	0	0	103,469,025	0	0	-	-	68.97	-	-	-	-	-
32. Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	0	35,000,000	0	0	0	0	5,974,200	0	0	-	-	17.07	-	-	-	-	-

VII. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa															
31. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	59,600,000	17,210,090	0	0	121,000,000	59,491,600	15,329,400	0	0	94,589,800	59.82	89.07	78.17	109,080,000	70,389,800
	7,950,472,695	9,619,272,193	10,873,570,670	14,452,627,900	14,761,560,518	6,290,367,006	8,002,951,253	8,056,569,667	12,938,765,413	10,168,327,186	83.22	98.58	74.09	10,171,465,979	7,816,015,082